

Masa Depan Infrastruktur Energi

Oleh Alwin Basri

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah

Anggota Fraksi PDI Perjuangan

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri di Jawa Tengah memerlukan kesiapan infrastruktur energi. Tanpa kesiapan infrastruktur energi maka potensi krisis energi di Jawa Tengah sangat terbuka, disamping dampak semakin menurunnya daya saing Jawa Tengah. Faktor daya saing inilah yang pada saat ini semakin nampak nyata. Sebagai gambaran adalah pesatnya pertumbuhan industri di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur akibat percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jaringan gas. Faktor harga keekonomian dan ramah lingkungan menjadi keunggulan pemanfaatan gas secara maksimal. Disamping sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Penulis melihat bahwa pengembangan jaringan gas dan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti micro hydro dan surya merupakan kunci keberhasilan pengembangan energi di Jawa Tengah untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan energi.

Harus diakui bahwa kondisi infrastruktur energi di Jawa Tengah khususnya gas, pada saat ini tertinggal dengan kedua wilayah tersebut. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak di Jawa Tengah masih sangat tinggi sementara infrastruktur gas belum terbangun secara maksimal.

Masa depan pembangunan infrastruktur gas tidak dapat dilepaskan dari regulasi tata ruang dan perencanaan pembangunan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan ruang bagi rencana

pembangunan infrastruktur gas yakni pertama, Pembangunan pipa gas Cirebon – Semarang – Bangkalan, Semarang – Kalimantan Timur, Semarang – Kepodang, Kepodang – Rembang – Pati – Jepara – Semarang. Kedua, Pembangunan pipa gas Semarang – Kendal dan Pembangunan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang.

Sementara dalam peraturan perencanaan dalam skala nasional sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 bahwa di wilayah Jawa Tengah terapat 3 Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dimana salah satunya adalah dalam sektor infrastruktur energi yakni : Pipa Cirebon-Semarang sepanjang 230 KM, FSRU Jawa Tengah 550 mmcf/d, dan Pipa Kepodang-Tambaklorok 250 Km yang mana jalur pipa Kepodang-Tambaklorok sudah terwujud.

Dengan demikian secara regulasi di tingkat pusat dan provinsi perencanaan pembangunan infrastruktur gas sebenarnya sudah tidak mengalami kendala. Terlebih ketika di wilayah-wilayah yang dilewati rencana jalur tersebut pemerintah kabupaten/kota juga telah menyediakan ruang yang tercermin dalam RTRW Kabupaten/Kota. Namun demikian persoalannya adalah mengapa hingga saat ini jalur pipa gas Cirebon-Semarang belum mampu terwujud. Dalam perspektif kewenangan tentu hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karenanya kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus mendorong agar rencana tersebut segera terimplementasikan. Infrastruktur inilah yang nantinya akan mampu mendorong percepatan pertumbuhan industri khususnya di wilayah Pantura Jawa Tengah.

Pertumbuhan industri menengah dan besar di Jawa Tengah juga mulai nampak dari wilayah Tengah ke Selatan. Semakin bertambahnya jumlah pabrik dari wilayah Kabupaten Semarang hingga ke Surakarta merupakan pertanda akan sinyalamen tersebut. Pada tataran inilah pembangunan infrastruktur gas harus mampu merespon perkembangan tersebut. Secara regulasi

yang tercermin dalam RTRW Provinsi dan Kab/Kota nampaknya belum menyiapkan ruang bagi pembangunan infrastruktur gas di wilayah Tengah dan Selatan Jawa Tengah. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis dan revisi terhadap ketersediaan ruang dalam RTRW provinsi, kabupaten/kota bagi pembangunan infrastruktur gas.

Dalam hal pengembangan energi baru terbarukan/EBT, secara regulasi dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan ruang bagi pengembangan EBT. Demikian halnya dari 35 kab/kota sebagian besar juga sudah memberikan ruang bagi pengembangan EBT. Sebagai gambaran misalnya di Kabupaten Grobogan yang menekankan pengembangan energi tenaga surya, angin, dan biogas. Namun demikian dalam praktiknya rencana dan ruang tersebut belum mampu terimplementasikan secara maksimal. Bahkan tidak sedikit dari infrastruktur EBT yang telah terbangun mengalami kondisi yang memprihatinkan karena minimnya kegiatan perawatan dan pada saat yang sama rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara.

Kebijakan dan politik anggaran merupakan persoalan utama pengembangan EBT di wilayah Jawa Tengah. Belum adanya kesadaran dalam bentuk kebijakan tentang pengembangan EBT dan rendahnya alokasi anggaran merupakan potret nyata. Oleh karena itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota perlu mendorong kebijakan disertai dengan keberpihakan anggaran untuk fokus pada pengembangan salah satu jenis EBT yang potensial. Fokus pengembangan salah satu jenis EBT sangat diperlukan mengingat banyaknya potensi EBT sementara sumber daya pemerintah terbatas. Pemanfaatan tanggung jawab sosial/CSR khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang energi untuk pengembangan EBT perlu untuk didorong. Inilah pintu gerbang membangun kedaulatan energi di Jawa Tengah.